



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Oni Choiruddin, S.H., M.M.
Jabatan : Deputi Bidang Persidangan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H.
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPD RI
selaku Sekretaris Jenderal DPD RI, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA



H. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H.
NRP. 70070207

Jakarta, 24 Agustus 2026
PIHAK PERTAMA



Oni Choiruddin, S.H., M.M.
NIP. 196804291997031001



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas RUU inisiatif yang dihasilkan DPD RI	Nilai kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU (P ₁₁₁)	12
		Nilai kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU (P ₁₁₂)	2
2	Meningkatnya kualitas pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR	Nilai kualitas dukungan bahan untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR (P ₁₂₁)	0,20
		Nilai Kualitas dukungan keahlian pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR (P ₁₂₂)	0,40
3	Meningkatnya kualitas pertimbangan atas RUU Mengenai APBN	Nilai kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN (P ₁₃₁)	0,20
		Nilai Kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN (P ₁₃₂)	0,20
4	Meningkatnya kualitas pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan, dan Agama	Nilai kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan, dan Agama (P ₁₄₁)	0,20
		Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan, dan Agama (P ₁₄₂)	0,20
5	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Nilai kualitas dukungan bahan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (P ₂₁₁)	0,20
		Nilai kualitas dukungan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (P ₂₁₂)	6,80
6	Meningkatnya kualitas tindak lanjut atas hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMADA	Nilai kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan	0,20

		terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (P ₂₂₁)	
		Nilai kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (P ₂₂₂)	0,60
7	Meningkatnya kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA	Nilai kualitas dukungan bahan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA (P ₂₃₁)	0,40
		Nilai kualitas dukungan keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA (P ₂₃₂)	0,40

Program/Kegiatan	Anggaran
A. Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	Rp 1.086.798.531.000
1. Penyelenggaraan fungsi legislasi DPD RI	Rp 886.286.850.000
2. Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPD RI	Rp 71.189.595.000
3. Pengelolaan Kerumahtanggaan dan Kerjasama DPD RI	Rp 40.566.226.000
4. Pemasyarakatan Produk Hukum	Rp 88.755.860.000

Jakarta, 24 Agustus 2026

PIHAK KEDUA



H. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H.
NRP. 70070207

PIHAK PERTAMA



Oni Choiruddin, S.H., M.M.
NIP. 196804291997031001